

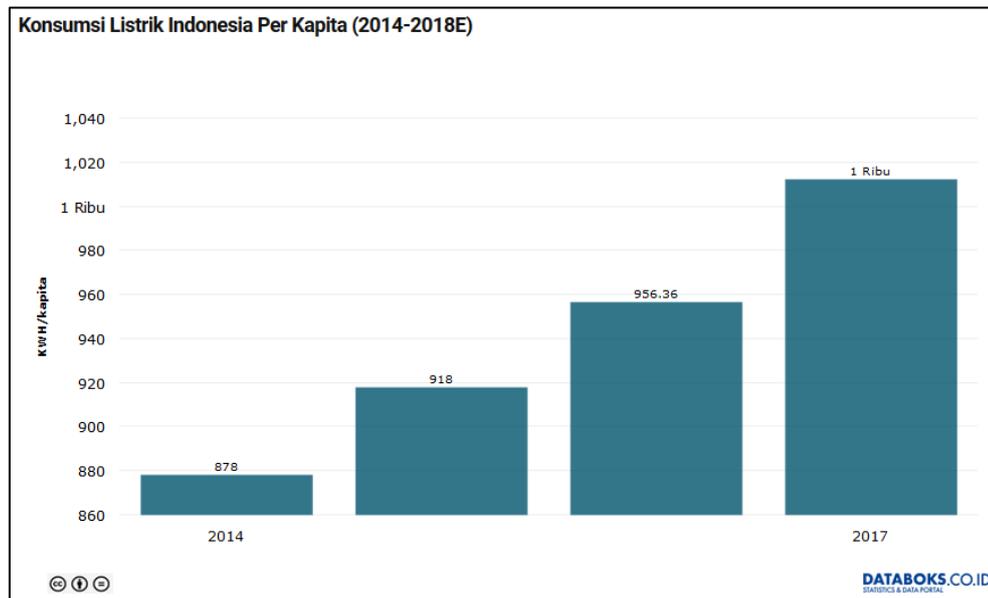
# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tidak dapat dipungkiri bahwa di zaman yang serba modern ini semua kegiatan manusia ditunjang oleh energi. Energi menjadi hal penting bagi keberlangsungan hidup semua manusia yang ada di muka bumi ini karena energi dan kehidupan memiliki hubungan yang sangat erat. Tanpa adanya energi maka semua aktivitas manusia akan terhambat. Energi itu banyak jenisnya, dari sekian banyak energi yang paling dibutuhkan manusia adalah energi listrik. Dari mulai rumah-rumah di kawasan kumuh hingga perumahan mewah pun semuanya menggunakan listrik. Energi listrik menjadi sangat penting karena hampir semua peralatan elektronik yang kita gunakan bersumber dari listrik terutama untuk memenuhi kebutuhan penerangan, sehingga manusia menjadi memiliki ketergantungan terhadap energi. Dari hari ke hari pemanfaatan energi akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk serta besarnya tuntutan untuk melakukan segala sesuatu (Tiaraputria, 2018).

Berdasarkan data Kementerian ESDM konsumsi listrik per kapita mencapai 994,41 kilo Watt hour (kWh) hingga September 2017. Angka ini naik 3,98 persen dari posisi akhir 2016 sebesar 956,36 kWh. Ditambah lagi adanya program pengembangan mobil listrik membuat kebutuhan stroom masyarakat kedepan akan meningkat. Guna mengantisipasi kenaikan tersebut, pemerintah juga meningkatkan kapasitas pemasangan pembangkit pada tahun ini menjadi sebesar 65 Giga Watt (GW) dari realisasi tahun lalu sebesar 60 GW. Hingga akhir 2018, rasio elektrifikasi ditargetkan sebesar 95,15 persen dan bakal mencapai 100 persen pada 2025. Saat ini rasio elektrifikasi di semua provinsi sudah di atas 70 persen, kecuali Nusa Tenggara Timur dan Papua masing-masing baru mencapai 60,74 persen (Katadata, 2017).

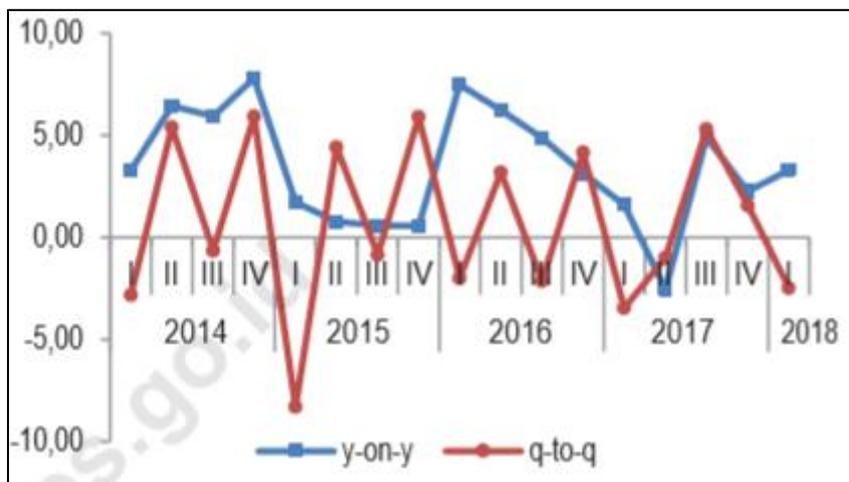


Sumber: Katadata, 2017

**Gambar 1.1 Konsumsi Listrik Indonesia Per Kapita (2014-2018E)**

Menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin) stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak terlepas dari dukungan sektor industri di berbagai bidang. Pemerintah melalui skema Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) merancang perkembangan ekonomi secara merata. Namun, sumbangan di sektor industri dalam Gross Domestic Bruto (GDP) Nasional masih di angka 21-22 persen. Padahal, Tingkat saham pada industri energi ditargetkan melampaui angka 30 persen pada tahun 2035 mendatang. Untuk mencapai tingkat saham sebesar GDP nasional, sektor industri perlu didorong lebih kuat. Sebab, target itu harus terpenuhi dalam 20 tahun kedepan. Ini adalah pekerjaan yang tidak mudah. Pemerintah harus siap untuk menyediakan infrastruktur pendukung majunya industri di Indonesia. Salah satu infrastruktur paling utama yang harus ada adalah ketersediaan energi, yaitu listrik (Republika, 2019).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan I/2018, kinerja lapangan usaha pengadaan listrik dan gas serta pengadaan air tumbuh masing-masing sebesar 3,31 persen dan 3,59 persen (y-on-y). Kinerja lapangan usaha pengadaan listrik dan gas didorong oleh peningkatan ketenagalistrikan sebesar 3,50 persen. Hal ini tercermin dari peningkatan pendistribusian pada seluruh segmen konsumen baik pemerintah, bisnis dan industri. Sementara kinerja pengadaan gas tumbuh sebesar 2,04 persen disebabkan oleh penyaluran perdana dikawasan industri dan jaringan gas rumahtangga di Jawa Timur. Bila dibandingkan dengan triwulan IV/2017 (q-to-q), pengadaan listrik dan gas mengalami kontraksi sebesar minus 2,47 persen. Hal ini disebabkan terjadinya kontraksi listrik sebesar 3,44 persen yang tercermin dari turunnya permintaan listrik terutama dari perlambatan aktivitas industri listrik. Sementara lapangan usaha pengadaan air tumbuh 4,34 persen (BPS, 2018).



Sumber: BPS, 2018

**Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan Listrik & Gas (Persen)**

Industri ketenagalistrikan Indonesia saat ini memiliki 3 tantangan besar, yaitu ketidakpastian regulasi, kurangnya koordinasi di antara kementerian/ lembaga pemerintah lainnya, dan pengelolaan program 35 GW berdasarkan Asosiasi Produsen Listrik Swasta. Temuan tersebut dikemukakan berdasarkan survei APLSI bekerja sama dengan PwC Indonesia di edisi pertama laporan Survei Industri Ketenagalistrikan Indonesia yang bertajuk “Melistriki Bangsa:

Survei Industri Ketenagalistrikan Indonesia Tahun 2017". Selain itu, realisasi konsumsi listrik secara nasional masih rendah. Berdasarkan data PT PLN (Persero) pertumbuhan penjualan listrik pada tahun 2017 hanya sebesar 3,3% turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,48%. Menurut Direktur Regional PLN Jawa bagian barat Haryanto WS di Mandarin Hotel, Jakarta, konsumsi listrik mengalami penurunan, di mana pada awalnya pertumbuhan listrik lebih tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun sekarang sebaliknya. Menurutnya, rendahnya konsumsi listrik tersebut menjadi akar direvisinya Rencana Usaha Pembangkit Tenaga Listrik 2018-2027. Pasalnya, dikhawatirkan terjadi *over supply* pembangkit listrik (BPS, 2018).

Di Indonesia, pemerintah mengatur dan mengelola berbagai sektor yang terdiri dari sektor industri, kehutanan, perikanan, perkebunan, telekomunikasi, energi dan sektor yang lainnya. Dan untuk mengelola berbagai industri tersebut maka pemerintah membentuk suatu badan usaha yang akhirnya dibentuklah Badan Usaha Milik Negara atau yang biasa disingkat sebagai BUMN (bumn.go.id, 2017)

BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat juga bisa berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Sejak tahun 2001, seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri BUMN. Perlu diketahui bahwa BUMN menjadi aset penting bagi negara Indonesia, karena penghasilan dari bisnis ini akan masuk ke dalam kas negara dan digunakan untuk membayar utang negara, membayar administrasi, dan kelengkapan ketika melakukan ekspor dan impor atau kerja sama Internasional dengan negara lain (Jurnal.id, 2017).

Di kutip dari website perusahaan PT.PLN salah satu perusahaan berbentuk BUMN adalah PLN. PT PLN (persero) yang berdiri pada 1 Januari 1965 sendiri adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan baik dari mulai mengoperasikan pembangkit listrik sampai

dengan melakukan transmisi kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. PLN sendiri memiliki tujuan menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Di dalam perusahaan PLN pun diberikan kompensasi dan tunjangan salah satu contohnya apabila ada karyawan yang sakit, dan penyediaan BPJS bagi para karyawannya dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan semangat para karyawan di PLN. (PLN, 2019)

Menurut Dessler (2015) dikatakan bahwa kompensasi yang akan diterima oleh karyawan dibagi menjadi dua yaitu *direct financial payments* dan *indirect financial payments*. Di mana *direct financial payments* meliputi gaji, *intensive*, komisi, dan bonus. Sedangkan *indirect financial payments* meliputi keuntungan yang diterima karyawan seperti asuransi / BPJS yang akan diterima karyawan serta *vacation* Di mana seluruh biaya ditanggung oleh pihak kantor.

Penulis berada di divisi KSA (Keuangan Sekertaris Administrasi) khususnya administrasi *compensation & benefit* yang artinya melakukan penyelenggaraan administrasi dan kearsipan untuk memperlancar lalu lintas surat-menyurat keluar dan masuk di perusahaan. Di dalam departemen *compensation & benefit* pada PT. PLN area Serpong tugas yang dijalankan yaitu pembuatan dan pengarsipan surat perjalanan dinas pegawai, hingga pendataan absensi pegawai guna melihat jam lembur dari karyawan. Dengan demikian, penulis ingin dapat berkesempatan mengetahui lebih dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam perusahaan industri energi listrik PT. PLN area Serpong. Berdasarkan latar belakang yang telah tertulis di atas maka penulis mengambil topik “Analisa Sistem Penerapan Kompensasi di PT. PLN Area Serpong, Tangerang Selatan” yang dibahas dalam laporan kerja magang.

## 1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Maksud dari praktik kerja magang ini adalah untuk mengetahui proses kerja divisi *human resources*, khususnya mengenai kompensasi dan hubungannya dengan divisi lain.

Tujuan dari praktik kerja magang ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan wawasan mengenai *Human Capital*.
2. Mempersiapkan penulis untuk bekerja langsung pada dunia profesional.
3. Memberikan kesempatan kepada penulis untuk menambah pengalaman dalam kerja magang.
4. Melatih penulis untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, disiplin, dan mandiri.
5. Meningkatkan *soft skill* yang dimiliki penulis.

## 1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

### 1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Program kerja magang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dari Program Studi Manajemen Universitas Multimedia Nusantara, yaitu dengan minimal 60 hari kerja. Pelaksanaan dari kerja magang adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. PLN Area Serpong

Alamat : Jln. Raya Civic Center No. 1 BSD Sektor VIII,  
Serpong – Tangerang 15321

Waktu Pelaksanaan : 07 Januari 2019 – 05 April 2019

Waktu Operasional : Senin – Jumat, pukul 07.30 – 16.00 WIB

Posisi Magang : KSA *Internship*

### 1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Prosedur kerja magang yang telah dilakukan oleh penulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Multimedia Nusantara dan PT. PLN adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum mahasiswa melakukan kerja magang, mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti pembekalan magang yang diadakan oleh program studi manajemen Universitas Multimedia Nusantara,
- b. Penulis melakukan pengisian formulir pengajuan kerja magang (KM-01) sebagai permohonan permintaan surat pengantar kerja magang (KM-02) dari universitas yang ditunjukkan kepada perusahaan yang akan dituju. Surat pengantar kerja magang (KM-02) telah ditandatangani oleh ketua program studi. Mahasiswa dapat memulai kerja magang jika resmi diterima oleh perusahaan dengan menerima surat balasan bahwa mahasiswa diterima kerja magang pada perusahaan yang dimaksud.
- c. Penulis mengirimkan *Curriculum Vitae* dan surat pengantar dari kampus kepada pihak PT. PLN.
- d. Setelah menunggu beberapa minggu, penulis dikabarkan bahwa dapat bekerja magang di PT. PLN.
- e. Menerima surat persetujuan permohonan pelaksanaan kerja magang di PT. PLN BSD Serpong dan memberikannya kepada BAAK untuk menjadi syarat mendapatkan form KM-03, KM-04, KM-05, KM-06, dan KM-07.
- f. Melaksanakan kerja magang dimulai pada tanggal 07 Januari 2019 dan diberikan pengarahan mengenai prosedur kerja.
- g. Penulis melakukan bimbingan laporan magang dan konsultasi mengenai praktek kerja magang dengan Ibu Christy sebagai dosen pembimbing magang.
- h. Menyusun laporan kerja magang yang disusun sesuai format dan struktur laporan kerja magang di Universitas Multimedia Nusantara.
- i. Melakukan sidang magang yang menjadi tolak ukur penilaian laporan kerja magang dan proses kerja magang mahasiswa sebagai syarat kelulusan mata kuliah magang.

#### **1.4 Sistematika Penulisan Laporan**

Penulisan laporan kerja magang ini dilakukan dengan metode dan sistematika penulisan dengan format baku yang diatur dalam buku “Panduan Kerja Magang Manajemen” tahun 2019 yang dibuat oleh Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Multimedia Nusantara dengan struktur sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian awal ini, penulis membahas mengenai latar belakang dalam bidang program kerja magang, maksud dan tujuan kerja magang, serta waktu dan prosedur pelaksanaan kerja magang.

##### **BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini, penulis menguraikan profil perusahaan, mulai dari sejarah singkat, visi dan misi, *core value* perusahaan, peranan *Human Capital* di perusahaan, anak perusahaan dari PT. PLN, dan struktur organisasi perusahaan. Selain itu, juga dilengkapi dengan tinjauan pustaka yang mendukung teori-teori yang terkait dengan topik kerja magang.

##### **BAB III PELAKSANAAN KERJA MAGANG**

Pada bab ini, penulis merincikan tugas-tugas yang dilakukan pada saat program kerja magang dan kendala-kendala yang terjadi serta dengan solusi yang dilakukan atas kendala yang ditemukan.

##### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini, penulis menarik kesimpulan dari teori yang digunakan dikaitkan dengan realisasi kerja di PT. PLN. Selain itu, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun pelaksanaan kerja di perusahaan PT. PLN.